

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

IMF (International Monetary Fund) dan Bank Dunia (World Bank) didirikan atas rekomendasi konferensi PBB di Bretton Woods, Amerika Serikat pada Juli 1944. Kedua lembaga ini dibentuk dengan tujuan untuk menata dan membangun kembali perekonomian dunia yang dilanda krisis seusai Perang Dunia II.

Sejak standar emas tidak berlaku lagi pada tahun 1971, IMF telah menetapkan misi barunya yaitu menyediakan pinjaman kepada Negara-negara yang mengalami masalah ekonomi. Negara-negara yang mengalami kesulitan dalam menyeimbangkan neraca pembayaran tunduk kepada IMF karena dua alasan<sup>1</sup>. Pertama, IMF menyediakan pinjaman untuk memenuhi kewajiban membayar pinjaman kepada kreditor asing. Kedua, para kreditor swasta atau kreditor publik lainnya seperti Bank Dunia tidak akan mau memberikan pinjaman kepada Negara-negara yang terpuruk ekonominya kecuali jika mereka memiliki perjanjian pinjaman dengan IMF.

Perjanjian-perjanjian dengan IMF secara tipikal mengharuskan Negara-negara yang berkepentingan tersebut untuk tunduk dan memberlakukan kebijakan-kebijakan "penyesuaian struktural" sebagai prasyarat mendapatkan pinjaman.

---

<sup>1</sup> Danaher, Kevin. *Demokratisasi Perekonomian Global*, Cindelas, Yogyakarta, 2006, hal 115

Bank Dunia didirikan untuk membantu rekonstruksi pasca perang Eropa. Dalam perkembangan selanjutnya, Bank Dunia mengalihkan perhatiannya pada usaha membantu pembangunan di Negara-negara Dunia Ketiga. Yakni untuk mendanai proyek-proyek infrastruktur utama : jalan, bendungan, pertambangan batubara, dan investasi besar lainnya yang tidak menarik perhatian investor swasta karena dipandang tidak memberikan keuntungan. Proyek-proyek ini ternyata telah menjadi sangat kontroversial dalam kaitannya dengan dampaknya terhadap lingkungan, masyarakat lokal, masyarakat pedesaan, dan kaum perempuan.

Mulai tahun 1980-an, sembari meneruskan proyek pinjamannya, Bank Dunia mulai mengalihkan pinjaman pada pinjaman penyesuaian struktural dan penyesuaian sektoral. Sekitar dua-pertiga dari pinjaman Bank Dunia saat ini dialokasikan untuk penyesuaian struktural yang secara signifikan tidak berbeda dengan apa yang ada dalam IMF.

IMF dan Bank Dunia secara bersama-sama melaksanakan satu program yang sekarang disebut sebagai dana untuk Negara-negara Miskin Penghutang Terbesar/ Pengentasan Kemiskinan dan Pertumbuhan (*Heavily Indebted Poor Country/ Poverty Reduction and Growth Fund*), yang memberikan keringanan pengembalian hutang yang sangat rendah selama Negara yang bersangkutan mau melaksanakan penyesuaian struktural yang ditawarkan.

IMF diharapkan berfungsi menstabilkan perekonomian dunia serta memberikan kredit jangka pendek, sedangkan Bank Dunia berfungsi untuk memberikan kredit murah jangka panjang dan bertanggung jawab atas

Penyesuaian struktural<sup>2</sup> adalah suatu paket kebijakan yang sejalan dengan apa yang disebut dengan neoliberalisme. Tujuan-tujuan pokok penyesuaian struktural tersebut adalah mengupayakan agar Negara-negara membuka pintu lebar-lebar bagi masuknya korporasi-korporasi transnasional untuk memperoleh akses tenaga kerja dan sumber-sumber daya alam mereka, memperkecil peran pemerintah, menggantungkan pendistribusian berbagai sumber daya alam dan pelayanan mereka sepenuhnya pada kekuatan pasar, dan mengintegrasikan negara-negara miskin tersebut ke dalam perekonomian global.

Seiring perjalanan waktu, kegiatan Bank Dunia dan IMF cenderung tumpang tindih. Sejak pecahnya krisis utang tahun 1982, keduanya terlibat penuh dalam “manajemen utang”. IMF yang disebut sebagai “pemadam kebakaran” lewat suntikan dana segar dalam bilangan besar bagi negara yang jatuh bangkrut. Di satu sisi, hal tersebut berhasil menghindari ambruknya sistem keuangan global. Namun di sisi lain, akibat pinjaman jangka pendek bersuku bunga tinggi tersebut, banyak negara miskin yang terperangkap dalam “jebakan utang”.

Banyak sudah kritik yang dituai oleh kedua lembaga internasional ini. Salah satunya adalah cap sebagai “utang membunuh”. Kritikan lain menyebutkan bahwa penerapan persyaratan atas pinjaman yang diberikan IMF kerap kali mengakibatkan keresahan sosial di negara yang dibantu. Contohnya adalah ketika pada dekade 1980-an IMF mencanangkan pengetatan ikat pinggang di Amerika Latin. Hal itu berdampak pada pengeluaran anggaran pemerintah untuk kelompok miskin. Kebijakan itu memunculkan protes besar-besaran di sejumlah negara

Amerika Latin saat itu. Meskipun telah melakukan perubahan struktur organisasinya, kritik terhadap Bank Dunia dan IMF belum juga reda. Kenyataannya, niat untuk fokus, misalnya, malah telah memperluas bidang kegiatan Bank Dunia itu sendiri.

Secara fundamental, kedua lembaga keuangan tersebut hanya bisa berubah bila bersedia melakukan amandemen statutenya serta sepakat menjalankan pengambilan keputusan secara demokratis. Dua lembaga pendanaan internasional ini didanai dan dikelola oleh 183 negara anggota yang memiliki kepentingan berbeda-beda. Pembagian hak suara sama sekali tidak demokratis dan merugikan negara kecil dan miskin karena didominasi negara-negara industri, terutama AS.

Pada saat yang bersamaan, lewat penyesuaian struktural yang dilakukan oleh Bank Dunia, negara-negara tersebut dipaksa untuk menghilangkan subsidi yang semakin menyengsarakan kelompok miskin.

Pada tanggal 19-20 September 2006 yang lalu, di Singapura diselenggarakan Pertemuan Tahunan Anggota IMF dan Bank Dunia yang banyak menuai protes atau pernyataan keras baik dari anggota organisasi itu sendiri maupun para aktivis dari berbagai negara di dunia<sup>3</sup>.

Strategi jangka menengah IMF yang akan menjadi bahan diskusi utama dari pertemuan itu adalah pemberian suara yang lebih besar bagi beberapa negara sednag berkembang, cara-cara baru penanganan krisis keuangan, penguatan pasar keuangan, dan tawaran tipe baru instrumen pinjaman kepada anggota IMF.

---

<sup>3</sup> *Journal of Economic Surveys*, IMF dan Bank Dunia, 2006, hal. 2886

Hasil akhir dari Pertemuan IMF dan Bank Dunia kali ini banyak mengundang kritik, yakni disetujuinya kuota lebih besar untuk Cina, Turki, Meksiko dan Korea Selatan. Namun perubahan kuota ini sama sekali tidak menyelesaikan masalah ketimpangan kekuasaan antara negara miskin dan negara kaya di IMF. Dengan suara begitu besar yang dimiliki negara-negara kaya, aneka keputusan IMF pasti diwarnai kepentingan negara-negara kaya.

Sebenarnya, reformasi sistem pengambilan keputusan dalam dua lembaga ini sudah lama dituntut oleh negara berkembang. Sedangkan tuntutan yang lain adalah pengurangan atau penghapusan utang luar negeri negara-negara berkembang. Konon, krisis utang luar negeri negara berkembang adalah akibat langsung kebijakan IMF dan Bank Dunia.

Dalam menapaki usianya yang ke-62, baik IMF atau Bank Dunia telah menyimpang dari tujuan awal pendiriannya, berbagai formula ekonomi-politik, terutama penerapan liberalisasi pasar modal yang terlalu cepat., telah mempertajam destabilisasi ekonomi dunia.

Ini terjadi karena kondisi perekonomian Asia dan Amerika Latin sedang berkembang dengan baik. Hal itu memberi kepercayaan diri kepada mereka dan menolak campur tangan IMF sebagai polisi keuangan. Peran lebih dalam Bank Dunia pada kebijakan ekonomi juga ditolak.

Negara-negara yang merupakan kekuatan ekonomi utama Asia menyimpulkan pembicaraan yang intinya menolak rencana peningkatan pengawasan IMF atas perekonomian mereka. Pihak Amerika Latin juga

menantang IMF untuk melakukan reformasi yang bisa lebih memberi makna bagi kepentingan kawasan itu.

Negara berkembang di Asia juga bergabung dengan negara lain dalam menyuarakan ketidakpuasan terhadap program antikorupsi yang dicanangkan Bank Dunia, yang didorong oleh Presiden Bank Dunia Paul Wolfowitz. Sikap keras dari sebagian anggota IMF itu sepertinya merupakan refleksi dari makin meningkatnya rasa percaya diri negara-negara itu. Asia dan Amerika Latin selama bertahun-tahun telah kesulitan mendapatkan pengampunan utang karena penolakan IMF.

Kinerja ekonomi yang makin membaik membuat beberapa negara melakukan pembayaran utang lebih cepat dari jadwal ke IMF. Penolakan atas campur tangan lebih dalam IMF menjadi alasan utama dibalik pembayaran utang itu.

Dari hasil riset yang dilakukan oleh puluhan LSM dari berbagai penjuru dunia ditemukan, IMF masih mengalami masa kredibilitas hampir 10 tahun setelah terjadinya krisis finansial Asia. Hal inilah yang lalu mendorong banyak negara untuk segera lepas dari lilitan pengawasannya. Di antara contoh kegagalan *shock therapy* IMF yang dikutip LSM adalah *default*-nya 100 miliar dollas AS dari 140 miliar dollar AS utang luar negeri Argentina di tahun 1992.

Sementara itu seperti dikutip kantor berita AFP, Thailand pada tahun 2003 telah membayar sebagian besar utangnya ke IMF dan segera menyatakan diri terbebas dari lilitan utang. Indonesia sendiri mengakhiri persetujuan utang tahun

2003 dan berencana membayar utang ke IMF dalam tempo dua tahun mendatang, yakni tahun 2008.<sup>4</sup>

Dapat dikatakan bahwa negara-negara anggota IMF dan Bank Dunia semakin lama makin berkurang responnya terhadap kedua lembaga tersebut. Hal ini sangat bertolak belakang dari awal keberadaan IMF dan Bank Dunia yang bertujuan untuk membantu serta meningkatkan perekonomian negara-negara anggotanya terutama negara-negara yang sedang berkembang.

## **B. Pokok Permasalahan**

Dari uraian di atas dapat ditarik suatu pokok permasalahan, yaitu ;

Mengapa negara-negara berkembang menolak keberadaan dan hasil kebijakan IMF dan World Bank pada Singapore Summit 2006?

## **C. Kerangka Pemikiran**

Teori yang digunakan dalam penelitian terhadap pokok permasalahan di atas adalah Teori Ketergantungan (Dependencia Theory)

Pada dasarnya, teori ini hendak menjelaskan persoalan kemunduran negara-negara bekas jajahan di Dunia Ketiga (negara berkembang) dengan melihatnya dalam konteks global. Adapun para teroris menyebutkan bahwa faktor kemunduran tersebut dapat berupa faktor internal dan eksternal dari Negara-negara itu sendiri.

Dari sekian banyak pakar, Paul Baran merupakan pencetus pertama lahirnya Teori Dependensia. Bagi Baran, pembangunan kapitalis yang

---

<sup>4</sup>Diambil dari: *Salah satu laporan IMF*, Kompas, 10 September 2006

berkesinambungan adalah mustahil terjadi di negara-negara Dunia Ketiga. Pandangan ini didasarkan pada hasil pengamatannya bahwa kapitalisme masuk ke negara-negara berkembang bukan melalui transfer bisnis monopolistik maju dari luar. Dengan demikian, pembangunan kapitalis di negara-negara miskin ini tidak disertai dengan kebangkitan kelas menengah dan hilangnya dominasi tuan tanah terhadap masyarakat, melainkan disertai pemberian fasilitas pada sedikit perusahaan monopolistik yang berkuasa secara sosial dan politik.

Baran mengakui bahwa investasi yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan multinasional dari negara-negara maju di negara-negara berkembang di satu sisi dapat meningkatkan pendapatan nasional negara-negara Dunia Ketiga tersebut. Namun, peningkatan pendapatan di negara-negara miskin ini tidak dapat dinikmati oleh sebagian besar kelompok masyarakat bahwa di negara miskin tersebut karena tingginya ketimpangan dalam distribusi pendapatan. Sehingga, Baran menyimpulkan bahwa pola pembangunan kapitalis mustahil bisa diterapkan di negara-negara Dunia Ketiga.

Dari hasil penelitiannya, Baran mencatat bahwa keuntungan yang dihasilkan oleh investasi perusahaan-perusahaan asing melalui eksploitasi sumber daya di negara-negara miskin tidak dinikmati secara merata. Keuntungan tersebut lebih banyak dinikmati oleh segelintir elit masyarakat saja. Dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya investasi asing tidak meningkatkan kesejahteraan di negara-negara miskin. Yang terjadi hanya perubahan kebiasaan sosial masyarakat miskin serta perubahan orientasi dari cakupan dan pemenuhan pasar dalam negeri menjadi orientasi produksi untuk memenuhi pasar luar negeri.

Perubahan sistem hubungan pastoralistik masyarakat feodal menjadi sistem kapitalis yang didasarkan pada rasionalitas pasar sebenarnya dapat dijadikan sebagai langkah awal untuk mentransformasi masyarakat ke arah kemajuan dan peradaban sebagaimana yang sudah dinikmati oleh masyarakat maju di Barat. Namun kenyataannya, penerapan nilai-nilai komersial di dalam tata hubungan sosial masyarakat feodal tersebut justru memperdebat eksploitasi investor. Suatu hal yang amat disayangkan, proses eksploitasi ini justru dibantu oleh para pejabat lokal yang korup, yang lebih mengabdikan pada kepentingan investor dan sistem kapitalis global ketimbang masyarakat di negara-negara miskin itu sendiri.

Menurut Andre Gunder Frank, keterbelakangan bukan suatu kondisi alamiah dari suatu masyarakat. Bukan juga karena masyarakat itu kekurangan modal. Keterbelakangan merupakan sebuah proses ekonomi, politik, dan sosial yang terjadi sebagai akibat globalisasi dari sistem kapitalisme. Keterbelakangan di negara-negara pinggiran adalah akibat langsung dari terjadinya pembangunan di negara-negara pusat.

Dalam teorinya, Frank mengembangkan konsep tentang negara-negara pusat dan pinggiran, yang disebutnya sebagai negara metropolis dan negara-negara satelit dan lebih berbicara tentang aspek politik dari hubungan politis-ekonomi antara modal asing dan kelas-kelas yang berkuasa di negara-negara satelit tersebut.

Dalam rangka mencari keuntungan yang sebesar-besarnya, kaum borjuis di negara-negara metropolis bekerja sama dengan pejabat pemerintah di negara-

negara satelit dan kaum borjuis yang dominan disana. Sebagai akibat kerjasama antara modal asing dan pemerintah setempat ini, muncullah kebijakan-kebijakan pemerintah yang menguntungkan modal asing dan borjuis lokal, dengan mengorbankan kepentingan rakyat banyak negara tersebut. Kegiatan ekonomi praktis merupakan kegiatan ekonomi modal asing yang berlokasi di negara satelit.

Pada teori Frank ini jelas ada tiga komponen utama yakni; (1) modal asing, (2) pemerintah lokal di negara-negara satelit, (3) kaum borjuis. Pembangunan hanya terjadi di kalangan ini saja. Sedangkan rakyat hanya menjadi tenaga upahan dan dirugikan. Bagi Frank, masyarakat di negara-negara satelit bukan lagi masyarakat feodal, karena kaum bangsawan yang ada sudah memproduksi untuk pasar dunia. Para bangsawan memang memperlakukan para petani dengan cara-cara feodal. Tetapi pada tingkat internasional, mereka sudah menjadi kelompok kapitalis. Mereka memproduksi untuk pasar dunia yang kapitalis.

Menurutnya, negara-negara satelit merupakan negara kapitalis. Karena itu, perubahan yang diperlukan adalah yang langsung menuju pada sosialisme. Jadi, keterbelakangan hanya bisa diatasi melalui revolusi, yakni revolusi yang melahirkan sistem sosialis.

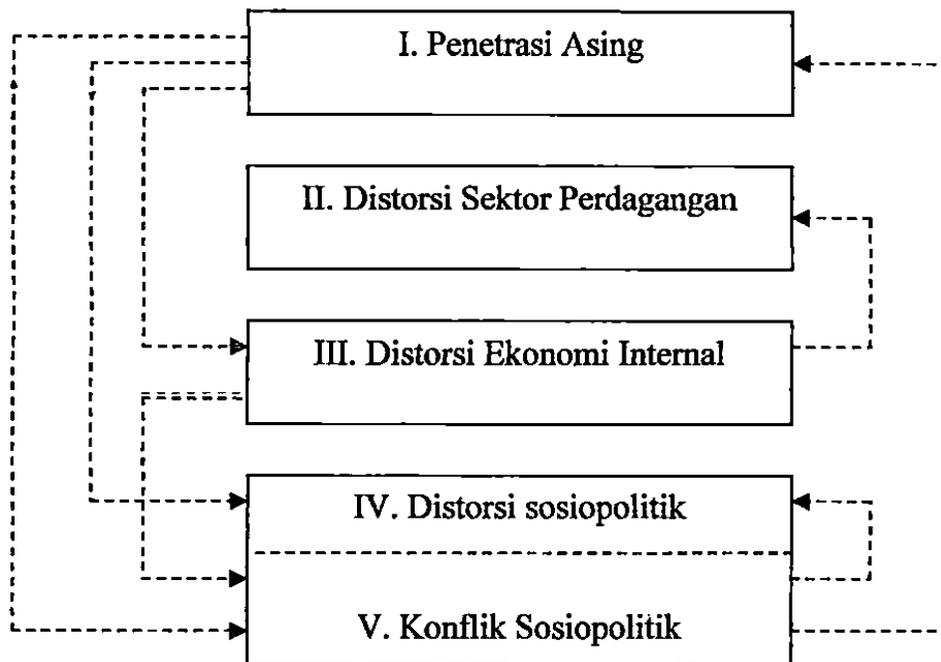
Dari uraian beberapa perspektif diatas, dapat ditarik suatu benang merah, bahwa inti dari teori dependencia adalah adanya penetrasi asing dan ketergantungan eksternal menyebabkan timbulnya distorsi besar-besaran dalam struktur ekonomi pinggiran, yang pada gilirannya menimbulkan konflik sosial yang gayat dan akhirnya mendorong timbulnya penindasan negara terhadap

rakyat di masyarakat yang tergantung itu. Hampir semua negara dunia ketiga sekarang mengalami penetrasi mendalam oleh, dan sangat tergantung pada, negara-negara industri maju dan terutama ekonomi dunia. Penetrasi itu bisa terjadi melalui berbagai cara, ekonomi, politik, dan kultural, dan pada berbagai periode perkembangan suatu negara.

Adapun teori ini dapat dipaparkan pada gambar berikut<sup>5</sup> (Gb.1)

(Gb.1)

Skema Teori Ketergantungan



Teori dependencia mengajukan argumen bahwa para penanam modal asing atau para pemberi bantuan modal dari luar negeri hanya tertarik pada sektor-sektor ekonomi yang dinamis di negara pinggiran itu. Mereka cenderung mendorong perkembangan sektor-sektor yang dinamis itu dan mengabaikan

<sup>5</sup> Raymond Duvall, et al., "A formal Model of Dependencia Theory : Struture and Measurement", dalam P. Morit dan P. Bussot (Eds.), *From National Development to Global Community* (Allen &

sektor-sektor lainnya. penetrasi kapitalis biasanya juga dipandang bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Salah satu pernyataan yang paling keras dari kalangan penganut aliran ketergantungan internasional adalah pernyataan Theotonio Dos Santos :

"Keterbelakangan bukanlah sebuah keadaan awal yang memang harus dialami suatu negara sebelum mencapai taraf kapitalisme, melainkan merupakan suatu akibat serta bentuk khusus dari kemajuan kapitalis yang patut disebut sebagai "kapitalisme yang tergantung". Ketergantungan adalah suatu keadaan yang mengakibatkan aktivitas pengelolaan dan upaya-upaya menciptakan kemajuan perekonomian dari sekelompok Negara tertentu didikte dan diatur oleh Negara-negara lainnya. Sedangkan perekonomian-perekonomian lainnya, karena nasib buruknya terpaksa pada situasi ketergantungan, hanya dapat memperluas (perekonomiannya) sebagai suatu refleksi dari perluasan yang dilakukan oleh negara-negara yang dominan. Tindakan-tindakan Negara dominan itu memberi banyak, pengaruh baik yang positif maupun negatif terhadap berbagai usaha pembangunan jangka pendek dari kelompok Negara yang lemah."<sup>6</sup>

Disamping itu teori dependencia menganjurkan agar negara-negara pinggiran menjalankan strategi "berdiri di atas kaki sendiri" dan meminimalkan kaitan-kaitan dengan ekonomi dunia, sulit diterima. Karena kenyataannya negara-negara pinggiran yang maju seperti Brasil, Argentina, Korea, dan Taiwan tidak bisa mengelakkan diri dari ketergantungan pada perdagangan internasional dan pada pinjaman luar negeri.

Teori dependencia menjelaskan timbulnya kemiskinan, ketimpangan, konflik dan represi politik di negara-negara dunia ketiga dengan mengaitkannya dengan variabel eksternal, yaitu penetrasi asing<sup>7</sup>.

---

<sup>6</sup> Theotonio Dos Santos, "The crisis of development theory and the problem of dependence in Latin America", *Siglo 21* (1969). Lihat pula uraian perbandingannya dalam buku Benjamin J Cohen, *The Question of Imperialism: The Political Economy of Dominance and Dependence* (New York: Basic Books, 1973)

<sup>7</sup> Mubtasir Mubtasir, *Uraian Hubungan Internasional Disiplin dan Metodologi* LP3ES, Jakarta, Hal



## **F. Teknik Pengumpulan Data**

Penulisan ini bersifat studi kepustakaan (library research), untuk itu penulis mengambil referensi berupa : buku-buku (literatur), makalah, bulletin, jurnal-jurnal, majalah, surat kabar, beberapa website di internet dan juga referensi-referensi lainnya yang relevan.

## **G. Sistematika Penulisan**

### **BAB I Pendahuluan**

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pokok Permasalahan
- C. Kerangka Pemikiran
- D. Hipotesis
- E. Tujuan Penelitian
- F. Teknik Pengumpulan Data
- G. Sistematika Penulisan

### **BAB II IMF dan World Bank**

- A. Sejarah Singkat IMF dan World Bank
- B. International Monetary Fund (IMF)
  - Program Stabilisasi IMF
- C. World Bank
  - Program Pinjaman World Bank
- D. Kerja sama antara IMF dan World Bank

**BAB III Peran IMF dan World Bank dalam pembangunan di Negara-negara sedang berkembang**

- A. Definisi Negara sedang berkembang.
- B. Masalah hutang Negara-negara berkembang.
- C. Sepak terjang IMF dan World Bank sebagai pemecahan masalah bagi Negara-negara berkembang
- D. Dampak Penyesuaian Struktural Bagi Ekonomi Dunia

**BAB IV Kegagalan IMF dan World Bank dalam pembangunan di Negara-negara sedang berkembang**

- A. Pertemuan IMF dan World Bank di Singapura 2006
- B. Kegagalan IMF dan World Bank dalam menerapkan kebijakan di negara-